

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi cap keimigrasian elektronik pada paspor WNA dalam perspektif hukum tata negara. Peningkatan mobilitas WNA akibat globalisasi menuntut sistem pengawasan keimigrasian yang lebih efektif dan adaptif berbasis teknologi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pengawasan WNA di Indonesia dan bagaimana implementasi cap keimigrasian elektronik untuk memperkuat pengawasan keimigrasian ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta wawancara dengan pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Semarang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan WNA memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya. Cap keimigrasian elektronik merupakan instrumen administratif digital yang terintegrasi dengan SIMKIM, berfungsi sebagai bukti perlintasan dan basis data dalam sistem pengawasan terpadu. Implementasinya mencerminkan pelaksanaan kewenangan negara melalui modernisasi administrasi berbasis teknologi, yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan terintegrasi meliputi verifikasi dokumen, pemindaian elektronik, dan pencatatan otomatis. Meskipun demikian, cap keimigrasian elektronik bukan instrumen pengawasan tunggal, melainkan bagian dari sistem pengawasan berlapis yang melibatkan TIMPORA, intelijen, dan penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur untuk mengoptimalkan efektivitas pengawasan WNA.

Kata kunci: Warga Negara Asing, Cap Keimigrasian Elektronik, Pengawasan Keimigrasian.